

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- A.A Sahid Gatara, *Civic Education*(Pendidikan politik, Nasionalisme dan Demokrasi), 2008, Bandung:Katta Pustaka kita
- Abdul Aziz Hakim, *Negara Hukum dan Demokrasi Di Indonesia*, Penerbit Pustaka Pelajar, 2011, Celeban Timur (Yogyakarta)
- Abu daud busroh, *Ilmu Negara*, 2011, Jakarta : Bumi Aksara
- A.Gunawan Setiardja, *Dialektika Hukum dan Moral dalam Pembangunan Masyarakat Indonesia*, (Yogyakarta: Kanisius, 1990)
- Ahsin Thohari, —*Kedudukan Komisi-Komisi Negara Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, Jentera Jurnal Hukum, Edisi 12 Tahun III April-Juni 2006, Jakarta, 2006.
- A. Kartiwa dan Nugraha, *Mengelola Kewenangan Pemerintahan*, 2012,Bandung,LEPSINDO,
- Algra, N.E., et al., *Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae Belanda Indonesia*, Binacipta, Bandung, 1983
- Amran Muslimin, *Beberapa Asas dan Pengertian Pokok Tentang Administrasi dan Hukum Administrasi*, 1985, Bandung ;Alumni,
- Arend Lijhpart, *Sistem Pemerintahan Parlementer dan Presidensial* . oleh R. Ibrahim, dkk, PT. Raja Grafindo Persada, 1995)
- Bagir Manan. *Wewenang Provinsi, Kabupaten, dan Kota dalam Rangka Otonomi Daerah*. Fakultas Hukum Unpad. Bandung, 2000.
- B Hestu Cipto Handoyo, 2009, Hukum Tata Negara Indonesia “*Menuju Konsolidasi Sistem Demokrasi*”, Universitas Atma Jaya, Jakarta
- Bagir Manan. *Wewenang Provinsi, Kabupaten, dan Kota dalam Rangka Otonomi Daerah*. Fakultas Hukum Unpad. Bandung, 2000.
- Bertens, K. 2000. *Etika*. Seri Filsafat Atma Jaya: 15. Jakarta: Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama.

- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 1997)
- Cornelis Lay , — *Sector publik , pelayanan public dan Governance//, dalam Terobosan dan Inovasi Manajemen Pelayanan Publik*, Fisipol UGM, 2005
- Dadi J. Iskandar, *Birokrasi Indonesia kontemporer*, 2006, Sumedang : Al-Qaprint jatinangor,
- Diana Halim Koentjoro, *Hukum administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Bogor
- Diana Halim Koentjoro, *Hukum Administrasi Negara*. (Bogor Selatan : Ghalia Indonesia, 2004),
- Djoko Prakoso, *Tindak pidana pegawai negeri sipil di Indonesia*, 1996, Jakarta : Sinar Grafika, hal 52.
- Denis F Thompson. *Etika politik pejabat Negara*, 2002, Jakarta : Yayasan Obor Indonesia..
- Firmansyah Arifin, et al., 2005, *Lembaga Negara dan Sengketa Kewenangan Antarlembaga Negara, Konsorsium Reformasi Hukum Nasional bekerjasama dengan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Jakarta
- Gunawan A. Tauda, 2012, *Komisi Negara Independen*, GENTA Press, Yogyakarta,
- Gie, The Liang, *Pertumbuhan pemerintah daerah di Negara republic Indonesia*, 1986, buku III, Jakarta : Gunung Agung
- Hariyono dkk, *Mambangun Negara Hukum Yang Bermartabat*, 2013, Jatim : Setara Press, hal 196 yang dikutip dari Satjipto Rahardjo, *Hukum Dalam Perspektif*
- Hendarmin Ranadireksa, *Visi bernegara (Arsitektur kontitusi Demokratik)*, 2007, Bandung : Fokus Media hal 220.
- Irfan Fachruddin. *Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah*. Bandung: PT Alumni, 2004.
- Jazim Hamidi dan Mustafa Lutfi, 2009, *Hukum Lembaga Kepresidenan Indonesia*, Malang, Alumni
- Jimly Ashididjje, 1994, *Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Ihtiar Baru van Hoeve, Jakarta,

- Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, cetakan pertama, (Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Dan Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004)
- Jimly Assiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Penerbit Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006
- Jimly Asshiddiqie, *Menjaga Denyut Nadi Konstitusi: Refleksi Satu Tahun Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2004), (Editor Refly Harun, dkk), hlm. 60-61.
- Jawahir thontowi, *Norma Hukum Pelayanan Publik, Jurnal Hukum*, Vol 14 No. 3 April 2004 , Yogyakarta : FH Universitas Islam Indonesia.
- Kementrian Koordinator Bidang Pengembangan Manusia Dan Kebudayaan, *Panduan Umum Gerakan Nasional Revolusi Mental*, Jakarta, Sekretariat Revolusi mental, 2016.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua, Balai Pustaka, Departemen Pendiidkan Dan Kebudayaan, Jakarta, 1991
- Keban, Yeremias T. 1994. *Pengantar Aministrasi Publik. Program MAP UGM*, Yogyakarta.
- K. Bartens, *Etika*, Jakarta:Gramedia Pustaka utama, 1994
- Kamal Hidjaz. *Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia*. Pustaka Refleksi. Makasar. 2010.
- Kamal Hidjaz. *Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia*. Pustaka Refleksi. Makasar. 2010.
- Laporan Kinerja KASN tahun 2016 hal 10 di unduh di situs resmi KASN pada tanggal 14 juli 2017 pukul 15.00 wib*
- Marjanne Termorshuizen, *Kamus Hukum Belanda-Indonesia cet-2*, (Jakarta: Djambatan, 2002),
- MTI, *Good Governance dan penguatan intitusi daerah*, 2002, Jakarta:MTI dan AusAID.
- Munir Fuady, *Teori Negara Hukum Modern (Rechstaat)*, 2009, Bandung : PT Refika Aditama.

- Maria Farida Indrati Soeprapto, 1998, *Ilmu Perundang-undangan (Dasar-Dasar dan Pembentukannya)*, Jakarta, Kanisius,
- Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1998),
- Miftah toha, *Manajemen kepegawaian sipil di Indonesia*, 2005, Jakarta: Kencana
- Nurmayani . *Hukum Administrasi Daerah*. Universitas Lampung Bandarlampung. 2009.
- Ni'matul Huda, *Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Review*, (Yogyakarta : UII Press, 2005)
- Nurmayani S.H.,M.H. *Hukum Administrasi Daerah*. Universitas Lampung Bandarlampung. 2009
- Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta 2013.
- Rusadi Kantaprawira, *Hukum dan Kekuasaan*, Makalah, (Yogyakarta:Universitas Islam Indonesia, 1998)
- Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta 2013.
- Riyadini B. *Responsibilitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Melalui Penelitian Evaluasi*. 2013. Jakarta.: Banyu Nusa Atmanakarya.
- Ridwan HR., *Hukum Administrasi Negara*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Rozali Abdullah. *Hukum Kepegawaian, edisi 1, cetakan 1*, 1986, Jakarta : Penerbit CV. Rajawali, Sirajudin, didk sukriono dan winardi, *Hukum Pelayanan Publik (berbasis partisipasi dan keterbukaan informasi)*, Malang : Setara Press, 2011
- Riyadi Soeprapto, *Pengembangan Model Citizen charter dalam meningkatkan Sejarah Dan Perubahan Sosial*, 2000, Jakarta: Rajawali
- S.F. Marbun, 1997, *Negara Hukum dan Kekuasaan Kehakiman*, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, No. 9 Vol. 4
- Sri Pudyatmoko, *Perizinan, Problem dan Upaya Pembinaan*, 2009, Jakarta : PT. Gramedia Widiarsana Indonesia.

- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Press, 2003), cet 7
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-PRESS, 1986)
- Sri Hartini, 2008, *Hukum Kepegawaian Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta,
- Saefullah Djadja, 2012, *Pemikiran Kontemporer Administrasi Publik : Perspektif Manajemen Sumberdaya Manusia Dalam Era Desentralisasi*, Bandung, LP3N FISIP UNPAD.
- Suwoto Mulyosudarmo, *Kekuasaan dan Tanggung Jawab Presiden Republik Indonesia, Suatu Penelitian Segi-Segi Teoritik dan Yuridis Pertanggungjawaban Kekuasaan*, (Surabaya: Universitas Airlangga, 1990)
- Supriadi, *Etika & Tanggung Jawab Profesi Hukum Di Indonesia*, 2008, Jakarta : Sinar Grafika
- Sri hartini, Setiajeng kadarsih dan tedi Sudrajat, *Hukum Kepegawaian Di Indonesia*, 2008, Jakarta : Sinar Grafika
- Sukanto satoto, *Pengaturan eksistensi dan fungsi badan kepegawaian Negara*, 2004, Yogyakarta: HK Offset.
- Teuku Amir Hamzah (ed.), *Ilmu Negara: Kuliah Padmo Wahjono*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Indo Hill Co., Jakarta 2003
- Utrecht, 1962, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Ichtiar, Jakarta.
- Prajudi Atmosudirdjo, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981
- Pelayanan public di Indonesia, *delegasi*, 2005, Banjarmasin : Pusat Penelitian
- Penjelasan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
- W. Riawan Tjandra, 2014, *Hukum Sarana Pemerintahan*, Cahaya Atma Pustaka, Jakarta,
- Widjaja, A.W. 2003, *Etika Administrasi Negara*, Bumi Aksara, Jakarta. Sekolah tinggi ilmu administrasi.

Wahyudi kumorotomo, *Akuntabilitas birokrasi publik(Sketsa pada masa transisi)*, 2005, Yogyakarta : Pustaka pelajar,

Yandianto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, 2001, Bandung M25 Bandung

## **B. Peraturan perundang-undangan**

Undang-undang Dasar Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.

Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental.

## **C. Artikel dan jurnal**

Dewi Sendhikasari D, USULAN PEMBUBARAN KASN DALAM REVISI UU ASN, majalah Info singkat Pemerintah dalam negeri, Vol. VIII, No. 24/II/P3DI/Desember/2016

Irawati. 2007. Pembaruan Administrasi dan Birokrasi (Sebuah Era Perubahan). Jurnal Madani Edisi I/Mei 2007.

Romli L. 2009. Masalah Reformasi Birokrasi. Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS. Pusat Pengkajian dan Penelitian Kepegawaian BKN

## **D. Referensi Elektronik**

[http. Prosedur Upaya Administratif Atas Penjatuhan Hukuman Disiplin Pns.html](http://prosedur.upaya.administratif.atas.penjatuhan.hukuman.disiplin.pns.html) di unduh di web resmi BKD Provinsi Jawa Barat pada tanggal 7 juli 2017 pukul 15,00 wib.

Laporan Kinerja KASN tahun 2016 hal 10 di unduh di situs resmi KASN pada tanggal 14 juli 2017 pukul 15.00 wib.

[http. disiplin-pegawai-negeri-sipil.htmh](http://disiplin-pegawai-negeri-sipil.htmh) di unduh di web resmi BKD Provinsi jawa Barat pada tanggal 7 juli 2017 pukul 15,00 wib

Wahyudi Djafar, Makalah — Komisi Negara” Antara „Latah“ dan Keharusan Transisional” dimuat dalam ASASI ELSAM, Edisi September-Oktober 2009.

<http://www.bkd.jawa-barat.go.id/> PROSEDUR UPAYA ADMINISTRATIF ATAS PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN PNS. Html di unduh dari Situs resmi BKD provinsi Jawa barat pada tanggal 20 juli 2017 pukul 15.00 wib

